

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM
PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KELURAHAN UJUNA
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

Achmad Wafi Junaedy
NPP. 32.0842

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Kebijakan Publik

Email: achmadwafijunaedy11@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Dyah Poespita E, M.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (Research Gap): This research is motivated by the suboptimal implementation of the Slum-Free City Program (KOTAKU) in Ujuna Village, the only village with a moderate slum category in West Palu District that has not experienced a decrease in slum area from 2021 to 2023. Meanwhile, the KOTAKU Program is a national program designed to achieve the target of 0% slum areas and should be able to reduce the level of slums through infrastructure improvements and community empowerment. **Purpose:** This study aims to evaluate the implementation of the KOTAKU Program in handling slum areas in Ujuna Village, identify inhibiting factors, and formulate solutions and efforts that have been made by the local government in optimizing program implementation. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach with William N. Dunn's (2003) policy evaluation theory which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies. **Results:** This study found that the implementation of the KOTAKU Program in Ujuna Village has not shown optimal results. There are still obstacles such as lack of collaboration between stakeholders, weak infrastructure maintenance, low community participation, and limited budget and technical coordination. However, the Palu City Government has made several efforts such as the cash-intensive work program and the riverbank revitalization plan, which have not had a significant impact on reducing slum areas. **Conclusion:** The KOTAKU Program in Ujuna Village has not succeeded in achieving the target of reducing slum areas. This shows the need to strengthen synergy between stakeholders, increase community awareness and involvement, and improve cross-sector planning and supervision systems so that the program runs more effectively, inclusively, and sustainably.

Keywords: Policy Evaluation; KOTAKU Program; Slums; William N. Dunn; Ujuna Village.

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Ujuna, satu-satunya kelurahan dengan kategori kumuh sedang di Kecamatan Palu Barat yang tidak mengalami penurunan luas kawasan kumuh sejak tahun 2021 hingga 2023. Sementara itu, Program KOTAKU merupakan program nasional yang dirancang untuk mencapai target 0% kawasan kumuh dan

seharusnya mampu menurunkan tingkat kekumuhan melalui perbaikan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Ujuna, mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta merumuskan solusi dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi pelaksanaan program. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori evaluasi kebijakan Dunn (2003) yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terdapat hambatan seperti kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, lemahnya pemeliharaan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran dan koordinasi teknis. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Palu telah melakukan beberapa upaya seperti program padat karya tunai dan rencana revitalisasi kawasan bantaran sungai, yang belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kawasan kumuh. **Kesimpulan:** Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna belum berhasil mencapai target pengurangan kawasan kumuh. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antar stakeholder, peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, serta perbaikan sistem perencanaan dan pengawasan lintas sektor agar program berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. **Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan; Program KOTAKU; Permukiman Kumuh; William N. Dunn; Kelurahan Ujuna.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah wilayah dengan kondisi perumahan yang tidak layak huni, infrastruktur yang buruk, serta minimnya akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik (Sadana, 2014). Permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kawasan ini umumnya ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kualitas bangunan yang buruk, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur jalan lingkungan. Masalah permukiman kumuh telah menjadi fenomena permasalahan yang klasik di tingkat global, nasional, regional bahkan lokal, jadi ini bukan merupakan persoalan yang baru (Syamsiar, Surya, and Tato 2020). Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Grossman dalam Firori & Wisana (2023), yaitu Pengembangan kesehatan masyarakat memiliki pengaruh penting terhadap kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah siap menghadapi tantangan tersebut dengan program KOTAKU, dengan tujuan utama menghilangkan permukiman kumuh untuk menciptakan permukiman manusia yang lebih baik di kota (Suprpto dkk, 2021). Di Indonesia, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang berbagai program strategis untuk menangani kawasan kumuh, salah satunya adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini menjadi instrumen penting dalam

mencapai target nasional “100-0-100,” yaitu 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah turut mengalami persoalan serupa. Dampak bencana alam pada tahun 2018 yang meliputi gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi telah memperparah kondisi permukiman di berbagai wilayah, termasuk di Kelurahan Ujuna yang terletak di bantaran sungai. Permukiman kumuh dan liar yang sering dijumpai yakni di bantaran sungai, bantaran sungai menjadi pilihan lokasi penduduk dalam mendirikan rumah darurat (Arisani et al., 2017). Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 653/1215/DPKP/2021, Kelurahan Ujuna merupakan satu-satunya kelurahan dengan kategori kekumuhan sedang di Kecamatan Palu Barat, dengan luas kawasan kumuh mencapai 4,59 hektare dari total luas wilayah 49 hektare. Fakta yang mengkhawatirkan adalah tidak adanya penurunan luas kawasan kumuh di kelurahan ini selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023), meskipun intervensi program KOTAKU telah dilaksanakan. Menurut Kickert dalam Zuhdi et al. (2024), kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan dalam jejaring kebijakan aktor independen. Definisi lain menurut Nugroho (2003), kebijakan publik diartikan sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional” karena bermakna sebagai hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional, dan memiliki ukuran yang jelas dalam melihat sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Namun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program tersebut, serta sejauh mana sinergi antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.

Melihat situasi tersebut, penting untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna. Evaluasi ini menjadi krusial untuk menilai pencapaian program berdasarkan enam kriteria dari teori evaluasi kebijakan Dunn (2003), yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, perlu diidentifikasi pula faktor-faktor penghambat serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam menjalankan program ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah maupun praktis dalam perumusan kebijakan penanganan kawasan kumuh yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan adaptif terhadap konteks lokal pascabencana.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai program penanganan kawasan kumuh, khususnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek implementasi program, dampak sosial ekonomi, maupun pengembangan konsep penataan kawasan kumuh secara umum. Beberapa penelitian bahkan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengukuran output program tanpa mengkaji secara mendalam proses dan kualitas pelaksanaannya. Selain itu, banyak kajian terdahulu hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program, sehingga kurang menggambarkan konteks daerah yang mengalami stagnasi atau kegagalan dalam capaian pengurangan kawasan kumuh.

Dalam konteks Kelurahan Ujuna, terdapat kondisi unik yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, yaitu tidak adanya penurunan luas kawasan kumuh selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) meskipun program KOTAKU telah dijalankan. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan program nasional dan realitas di tingkat lokal. Kelurahan Ujuna menjadi satu-satunya kelurahan dengan status kekumuhan **sedang** di Kecamatan Palu Barat, dan meskipun berada di pusat kota serta telah menerima intervensi melalui program padat karya dan perbaikan infrastruktur, tetap tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam kondisi lingkungan permukimannya. Fenomena ini belum banyak dibahas secara kritis, terutama dalam kerangka evaluasi kebijakan yang menyeluruh dan berbasis teori.

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan (gap) tersebut dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) yang mencakup enam kriteria penilaian utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat untuk mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU secara menyeluruh, termasuk menelaah hambatan implementasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat. Dengan fokus pada kasus Kelurahan Ujuna yang menghadapi stagnasi program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur evaluasi kebijakan publik, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki arah dan pelaksanaan program serupa di masa depan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah dilakukan di berbagai daerah dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Fhandemi Ulvansyah, Sri Indarti, dan Titi Darmi (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu* bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program KOTAKU di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa program telah cukup berhasil memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar seperti drainase. Namun, evaluasi yang dilakukan belum menyeluruh karena tidak membahas aspek kolaborasi pemangku kepentingan dan keberlanjutan program secara mendalam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus; jika penelitian terdahulu menilai pencapaian program, maka penelitian ini mengevaluasi proses dan hambatan program KOTAKU secara sistematis di Kelurahan Ujuna.

Fasya Nindya Ayu Arjihien (2023) menulis tentang *Implementasi Program Penataan Permukiman Kumuh di Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal*. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana program KOTAKU diimplementasikan dalam konteks lokal serta dampak yang ditimbulkan. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini menemukan adanya peningkatan kondisi lingkungan, namun juga mencatat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan penolakan terhadap pelebaran jalan. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada evaluasi menyeluruh menggunakan teori evaluasi Dunn (2003).

Melly Hayati, Dahlan Tampubolon, dan Ufira Isbah (2023) melakukan penelitian dengan judul *Dampak Program Kotaku terhadap Kesejahteraan Masyarakat yang Dilihat dari Aspek Ekonomi (Studi Kasus di Kelurahan Sri Meranti, Kota Pekanbaru)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis *Paired Sample T-Test*, dan menunjukkan bahwa Program KOTAKU memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini tidak mengevaluasi program dari aspek kelembagaan, sosial, atau keberlanjutan. Penelitian penulis lebih komprehensif karena tidak hanya melihat dampak, tetapi juga proses pelaksanaan dan kendala kebijakan.

Yeyen Fransiska, Veronica Tokii, Rezki Awalia, dan Ardiansyah Winarta (2023) dalam penelitiannya berjudul *Konsep Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Eco-Settlements di Kelurahan Ujuna Kota Palu*, berfokus pada perancangan konsep permukiman ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis eco-settlements, namun tidak mengevaluasi secara langsung pelaksanaan program KOTAKU. Persamaan lokus menjadikan penelitian ini relevan sebagai pembandingan, tetapi pendekatannya sangat berbeda, karena peneliti lebih menekankan evaluasi kebijakan berbasis implementasi aktual program pemerintah yang sedang berjalan.

Kandusu, Miswan, & Yani (2018) dalam penelitiannya berjudul *Gambaran Kondisi Sanitasi Lingkungan pada Kawasan Kumuh di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat*, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memetakan kondisi sanitasi di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menggunakan sumber air tidak terlindungi, membuang sampah dan limbah ke sungai, serta belum memiliki sistem sanitasi yang layak. Meski lokusnya sama dengan penelitian ini, fokus penelitian terdahulu lebih pada aspek lingkungan dan kesehatan, bukan evaluasi kebijakan penanganan kawasan kumuh melalui program intervensi pemerintah seperti KOTAKU.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang jelas dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu yang telah dianalisis sebelumnya. Penelitian oleh Fhandemi Ulvansyah, Sri Indarti, dan Titi Darmi (2023) di Kota Bengkulu memang membahas evaluasi Program KOTAKU, namun hanya menilai pencapaian pembangunan fisik seperti drainase, tanpa menyentuh secara mendalam hambatan implementasi dan keterlibatan pemangku kepentingan lokal. Sementara itu, penelitian oleh Fasya Nindya Ayu Arjihen (2023) di Kota Tegal fokus pada implementasi program, bukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh, sehingga belum menjelaskan secara sistematis keberhasilan atau kegagalan berdasarkan indikator evaluasi tertentu. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, studi ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan Dunn (2003) yang meliputi enam kriteria evaluatif, sehingga mampu memberikan penilaian lebih mendalam terhadap pelaksanaan program.

Kemudian, penelitian oleh Melly Hayati, Dahlan Tampubolon, dan Ufira Isbah (2023) di Pekanbaru menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada dampak ekonomi program, tanpa mempertimbangkan proses kebijakan, peran stakeholder, maupun konteks lokal yang memengaruhi efektivitas program. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan

menyajikan analisis mendalam tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga terhadap proses pelaksanaan dan dinamika di lapangan. Sementara itu, studi oleh Fransiska dkk., (2023) di Kelurahan Ujuna lebih menekankan konsep eco-settlements sebagai solusi penataan kawasan, namun tidak melakukan evaluasi langsung terhadap program yang sedang berjalan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan itu dengan memfokuskan evaluasi terhadap program nyata (KOTAKU) yang telah berlangsung di lokasi yang sama, namun dengan hasil yang stagnan.

Adapun penelitian oleh Kandusu dkk., (2018) menggambarkan kondisi sanitasi lingkungan di Ujuna secara kuantitatif, tetapi tidak mengaitkan temuan tersebut dengan evaluasi kebijakan atau pelaksanaan program tertentu. Penelitian ini melampaui batasan tersebut dengan secara eksplisit mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU di wilayah pascabencana yang kompleks secara sosial, ekonomi, dan geografis. Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan evaluatif komprehensif berbasis teori Dunn (2003), fokus pada kelurahan dengan status kekumuhan stagnan, serta konteks pasca-bencana yang belum banyak dikaji secara mendalam oleh studi sebelumnya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik kebijakan publik, khususnya dalam penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak adanya penurunan kawasan kumuh di Kelurahan Ujuna selama periode 2021 hingga 2023, serta menganalisis berbagai upaya dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan program agar selaras dengan tujuan nasional pengentasan kawasan kumuh.

Tujuan penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Hamid (2018), yang menyatakan bahwa manajemen pemerintahan daerah dituntut untuk mampu memberdayakan potensi lokal dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kinerja kebijakan dari sisi teknis, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan kelembagaan lokal, masyarakat, serta sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kapasitas manajerial pemerintahan daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berbasis pada potensi lokal serta berdampak jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu

Barat, Kota Palu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, dinamika, serta hambatan dalam pelaksanaan program dari perspektif para pelaku dan penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013) bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara holistik melalui deskripsi dalam konteks khusus secara mendalam. Penelitian ini menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sebagai acuan dalam menganalisis kinerja kebijakan di tingkat lokal.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program, seperti aparat kelurahan, pengelola program KOTAKU, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Wawancara dilakukan secara terbuka dan semi-terstruktur untuk menggali informasi yang relevan terkait pelaksanaan program, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekumuhan. Dokumentasi diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan pelaksanaan program, serta data statistik mengenai kawasan kumuh. Simangunsong (2019) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama karena keterlibatan langsungnya mempengaruhi proses pengumpulan dan interpretasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara berulang dan simultan untuk memastikan validitas temuan. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, serta pemeriksaan kredibilitas informan melalui konfirmasi ulang hasil wawancara. Metode ini memungkinkan peneliti menyusun gambaran yang utuh dan mendalam mengenai keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penelitian mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh Dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang diperoleh di lapangan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, dan kemudian dijelaskan menggunakan teori evaluasi menurut Dunn (2003) yang mencakup 6 dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Sehingga *outcome* yang diharapkan adalah Terwujudnya 0% kawasan kumuh dan kawasan perumahan permukiman yang layak huni, aman, serta inklusif di Kelurahan Ujuna sesuai dengan pendapat Hartono dkk., (2021), yaitu perumahan yang layak adalah tempat atau daerah dimana penduduk bertempat tinggal atau hidup bersama, dengan membangun sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

3.1. Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Ujuna

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang dijalankan sejak Tahun 2017 dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di perkotaan. Menurut Hamdi (2015), kebijakan publik dapat diartikan sebagai pola serta tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan untuk menjalankan suatu pemerintahan dalam suatu negara. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan permukiman layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Di Kota Palu, program ini menjadi upaya utama dalam mengatasi kawasan kumuh yang tersebar di beberapa kelurahan. Di Kelurahan Ujuna, program ini dijalankan mulai Tahun 2020 pasca terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta wabah covid-19. Kelurahan ini di memiliki kategorisasi tingkat kekumuhan “kumuh sedang” dengan luas delienasi kumuh 4,59 Ha dari luas wilayah 49 Ha, artinya kelurahan ini memiliki 9,37% wilayah kumuh. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai program KOTAKU ini dengan menggunakan teori evaluasi Dunn (2003) yang mencakup 6 dimensi yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

a. Efektivitas

Evaluasi terhadap efektivitas Program KOTAKU menunjukkan bahwa meskipun sejumlah infrastruktur seperti jalan paving blok, drainase, MCK, dan sarana air bersih telah dibangun di beberapa RT/RW, namun belum berdampak signifikan terhadap pengurangan luas kawasan kumuh di Kelurahan Ujuna. Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023, luas kawasan kumuh tetap berada di angka 4,59 hektare, menjadikan Ujuna sebagai satu-satunya kelurahan di Palu Barat yang tidak mengalami pengurangan kawasan kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa capaian output fisik tidak secara otomatis mengubah status kekumuhan wilayah

- Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari keberlanjutan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Temuan di lapangan menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas publik seperti saluran air bersih dan jalan lingkungan, menyebabkan beberapa infrastruktur rusak atau tidak berfungsi optimal

.Ini menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada pemeliharaan yang konsisten, baik oleh masyarakat maupun institusi yang berwenang. Selain itu, efektivitas juga terkendala oleh masih tingginya indikator kekumuhan seperti kepadatan bangunan dan kelayakan konstruksi rumah yang tidak menjadi fokus utama intervensi program. Dengan demikian, efektivitas Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna dinilai belum optimal karena hanya menyentuh sebagian kecil dari indikator kekumuhan secara keseluruhan.

b. Efisiensi

Menurut Dunn (2003:430), Efisiensi berkenaan dengan banyaknya usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi mengacu pada jumlah sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Ini mencakup analisis biaya dan manfaat, di mana efisiensi diukur berdasarkan biaya per unit hasil yang

dicapai. Kebijakan dianggap efisien jika dapat mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal.

Dari segi efisiensi, Program KOTAKU menghadapi tantangan besar dalam hal kecukupan anggaran. Untuk mengentaskan satu hektare kawasan kumuh secara menyeluruh dibutuhkan dana sekitar Rp2 miliar, sedangkan Kelurahan Ujuna hanya menerima alokasi dana sebesar Rp1–2 miliar secara keseluruhan, meskipun wilayahnya memiliki kekumuhan lebih dari 4 hektare. Hal ini menyebabkan alokasi dana hanya dapat digunakan untuk sebagian kebutuhan teknis, seperti pembangunan drainase dan jalan lingkungan.

Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran menyebabkan program harus selektif dalam intervensi. Prioritas hanya diberikan pada indikator teknis yang mudah diukur dan ditangani, sementara isu-isu mendalam seperti penataan ulang permukiman padat atau peningkatan kualitas bangunan tidak tersentuh. Akibatnya, pengeluaran tidak menghasilkan dampak proporsional terhadap pengurangan kawasan kumuh. Secara keseluruhan, efisiensi program berada pada tingkat rendah hingga sedang karena dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan luas kawasan yang ditangani maupun perubahan kategori kekumuhan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pendanaan tambahan melalui kolaborasi lintas sektor.

c. Kecukupan

Menurut Dunn (2003:430), “Adequacy (kecukupan) berkaitan tentang seberapa memuaskan kebutuhan nilai, atau risiko timbulnya masalah diukur dari jauhnya tingkat efektivitas.” Kriteria ini menilai apakah tingkat efektivitas yang dicapai cukup untuk memenuhi nilai atau kesempatan yang mendasari masalah tersebut.

Dimensi kecukupan berfokus pada sejauh mana fasilitas yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengatasi kekumuhan. Temuan menunjukkan bahwa indikator infrastruktur seperti drainase dan MCK telah dibangun sesuai dengan kebutuhan teknis berdasarkan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), dan dalam banyak kasus dinilai sudah “memadai” dalam hal jumlah atau volume.

Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Misalnya, pembangunan MCK diukur dari jumlah unit yang terbangun, bukan dari jumlah warga yang mengaksesnya atau kebersihan dan keberlanjutannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis terpenuhi, kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terjawab terutama jika dikaitkan dengan perbaikan kualitas hidup jangka panjang. Dengan demikian, dari segi kecukupan, program ini cukup berhasil dalam membangun sarana fisik, namun belum menyentuh secara menyeluruh pemenuhan nilai dan harapan masyarakat terhadap perbaikan kawasan permukiman secara utuh

d. Pemerataan

“Pemerataan (equity) berkaitan tentang rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat serta usaha antara kelompok yang berada tengah masyarakat”

(Dunn, 2003:435). Perataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan biaya dari kebijakan kepada berbagai kelompok dalam masyarakat. Kriteria ini menilai apakah hasil dari kebijakan didistribusikan secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang dirugikan atau mendapatkan manfaat secara tidak proporsional.

Evaluasi terhadap pemerataan menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Kegiatan seperti Cash for Work hanya melibatkan sebagian warga yang sudah terhubung dengan kelembagaan setempat seperti BKM atau RT, sementara kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, buruh harian, dan lansia cenderung tidak terlibat.

Selain itu, pemerataan akses terhadap hasil pembangunan juga masih terbatas. Misalnya, tidak semua RT/RW menerima intervensi infrastruktur secara proporsional. Beberapa wilayah yang secara teknis lebih membutuhkan malah tidak menjadi prioritas karena keterbatasan dana atau kendala teknis. Hal ini menandakan bahwa prinsip keadilan dalam pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan, baik dalam aspek distribusi sumber daya maupun keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

e. Responsivitas

Menurut Dunn (2003:437), Responsiveness (responsivitas) berkenaan dengan sejauh man sebuah target kebijakan dapat dipuaskan oleh sebuah kebijakan berdasarkan kebutuhan, preferensi, serta nilai ditengah masyarakat. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif secara umum tetapi juga relevan bagi masyarakat yang dilayani.

Dalam aspek responsivitas, Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna telah menyediakan saluran komunikasi berupa Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau saran melalui berbagai media seperti *WhatsApp*, pertemuan warga, dan BKM. Meskipun mekanisme ini sudah tersedia, implementasinya belum optimal. Banyak warga tidak mengetahui keberadaan saluran pengaduan ini, atau merasa ragu untuk menggunakannya.

Selain itu, proses tindak lanjut terhadap pengaduan belum transparan, menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan program. Oleh karena itu, responsivitas program dapat dikatakan cukup, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menindaklanjuti keluhan secara akuntabel.

f. Ketepatan

Menurut Dunn (2003:437), Ketepatan berkaitan dengan relevansi dan kesesuaian tujuan program dengan kondisi masyarakat. Kriteria ini menilai apakah tujuan dan hasil dari kebijakan benar-benar sesuai dan bermanfaat bagi kelompok sasaran, serta apakah asumsi dasar yang mendasari tujuan tersebut valid. Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna secara administratif sudah tepat sasaran karena menasar wilayah dengan status kumuh sedang yang menjadi prioritas dalam SK Wali Kota Palu. Namun dalam praktiknya,

intervensi lebih difokuskan pada pembangunan fisik, sementara aspek sosial dan ekonomi masyarakat kurang disentuh secara maksimal.

Kegiatan seperti pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi lokal, atau pemberdayaan masyarakat miskin hanya dilakukan dalam skala kecil dan sifatnya sementara. Padahal, ketepatan program juga mengukur kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan lokal yang kompleks, terutama pascabencana. Dengan demikian, program KOTAKU di Ujuna tepat secara lokasi dan sasaran, namun belum sepenuhnya tepat dalam pendekatan karena masih kurang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi akar dari permasalahan kekumuhan.

3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna tidak terlepas dari sejumlah hambatan struktural maupun teknis yang menghambat pencapaian tujuannya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan cakupan indikator kumuh yang ditangani dalam program. Dari tujuh indikator kumuh yang ada, program hanya berfokus pada aspek teknis seperti akses air bersih, saluran drainase, dan jalan lingkungan. Sementara itu, indikator seperti kepadatan bangunan, keteraturan bangunan, dan kualitas konstruksi rumah yang menjadi faktor dominan dalam kekumuhan wilayah justru tidak tersentuh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis dan kewenangan program, yang hanya menangani permukiman secara parsial tanpa intervensi struktural menyeluruh seperti relokasi atau penataan ulang kawasan padat.

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan anggaran yang diterima Kelurahan Ujuna dalam pelaksanaan program. Berdasarkan data yang diperoleh, untuk menangani kawasan kumuh seluas satu hektare secara ideal dibutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Namun, Kelurahan Ujuna dengan luas kawasan kumuh 4,59 hektare hanya menerima alokasi dana sebesar Rp1–2 miliar selama masa program. Akibatnya, pelaksanaan program harus dilakukan secara selektif dan bertahap, hanya menysasar titik-titik yang dianggap paling prioritas atau mudah dijangkau. Situasi ini menciptakan ketimpangan penanganan antarkawasan dalam satu kelurahan dan membuat hasil program kurang maksimal. Beberapa wilayah tetap mengalami kondisi kumuh meskipun sudah mendapat intervensi.

Selanjutnya, terdapat hambatan dalam bentuk dominasi pendekatan fisik dan teknis dalam pelaksanaan program. Program KOTAKU dinilai lebih fokus pada pembangunan infrastruktur seperti paving blok, drainase, dan MCK, tanpa diimbangi oleh pendekatan sosial dan ekonomi yang menysasar akar persoalan kekumuhan. Minimnya pelatihan keterampilan, pendampingan ekonomi, atau program pemberdayaan masyarakat menyebabkan perubahan kondisi sosial tidak terjadi secara signifikan. Banyak masyarakat yang hanya menjadi penerima manfaat secara pasif, tanpa diberikan kapasitas untuk memelihara atau mengembangkan hasil program. Hal ini berisiko menimbulkan ketergantungan dan mempercepat kerusakan fasilitas yang telah dibangun.

Partisipasi masyarakat yang belum merata juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program. Kegiatan seperti Cash for Work memang melibatkan warga setempat, namun keterlibatan tersebut masih didominasi oleh individu yang sudah dekat dengan struktur kelembagaan seperti BKM atau RT. Sementara itu, kelompok marginal seperti perempuan kepala

keluarga, penyandang disabilitas, lansia, dan buruh harian tidak banyak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Kurangnya mekanisme partisipatif yang inklusif mengakibatkan program tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menghambat efektivitas dan keberlanjutan program karena partisipasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat.

Hambatan terakhir adalah lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Meskipun secara kelembagaan telah dibentuk mekanisme pengaduan melalui media seperti WhatsApp, forum warga, dan koordinasi dengan kelurahan, banyak warga yang tidak mengetahui atau merasa ragu untuk menggunakannya. Ketiadaan respons yang cepat dan transparan terhadap laporan warga menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap sistem. Selain itu, pemeliharaan hasil pembangunan juga terkendala oleh lemahnya pengawasan dari KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara), yang perannya belum berjalan secara optimal. Minimnya pelatihan dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap KPP juga memperparah kondisi ini. Akibatnya, banyak infrastruktur yang dibangun cepat mengalami kerusakan karena tidak dirawat dengan baik oleh masyarakat.

3.3. Upaya Pemerintah

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Pemerintah Kota Palu telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna. Salah satu strategi utama adalah mendorong penerapan pendekatan kolaboratif lintas sektor, atau dikenal sebagai strategi “keroyokan.” Pendekatan ini melibatkan sejumlah instansi dan perangkat daerah lain seperti Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Balai Wilayah Sungai dalam penanganan kawasan kumuh. Dengan mengintegrasikan perencanaan lintas instansi, beban pembiayaan dan pelaksanaan program tidak hanya dibebankan pada KOTAKU, tetapi didistribusikan ke berbagai sektor sesuai kewenangannya. Hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara sektoral.

Upaya lainnya adalah penguatan peran kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam program, seperti BKM, KSM, dan KPP. Pemerintah memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada lembaga-lembaga ini agar lebih siap dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengelola hasil program. BKM dilibatkan dalam proses verifikasi usulan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan di lapangan, sementara KPP diberi tanggung jawab dalam aspek pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur. Melalui penguatan kelembagaan lokal, pemerintah berharap tercipta kemandirian masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap intervensi pemerintah.

Pemerintah Kota Palu juga melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan seperti revisi RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan usulan program di Musrenbang agar selaras dengan kebutuhan penanganan kumuh secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana pengentasan kawasan kumuh di Ujuna tidak hanya menjadi proyek satu kali, tetapi berkelanjutan melalui integrasi dengan program-program pemerintah lainnya seperti DAK, Dana Kelurahan, dan kegiatan dari instansi vertikal. Dengan dokumen perencanaan

yang diperbarui dan berbasis data aktual, pelaksanaan program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan terukur.

Selain pendekatan fisik, pemerintah juga mulai mendorong program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi. Salah satu contohnya adalah melibatkan warga dalam kegiatan padat karya tunai (cash for work) yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan pekerjaan teknis, tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku usaha lokal agar dapat menciptakan program pelatihan keterampilan, inkubasi wirausaha, dan pendampingan ekonomi yang relevan dengan kondisi warga. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya merasakan manfaat pembangunan secara fisik, tetapi juga mendapatkan peningkatan kapasitas ekonomi.

Akhirnya, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem pengawasan dan pengaduan dengan memperluas saluran komunikasi, memperjelas alur respon terhadap laporan warga, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan. Beberapa forum warga dan diskusi komunitas mulai rutin dilaksanakan untuk menyerap aspirasi secara langsung. Pemerintah juga mendorong transparansi dalam penyampaian informasi melalui papan pengumuman kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Semua ini ditujukan untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat, yang menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Ujuna belum menunjukkan hasil yang optimal dalam penanganan kawasan kumuh. Evaluasi menggunakan enam kriteria dari teori Dunn (2003) menemukan bahwa meskipun beberapa aspek seperti pelaksanaan pembangunan fisik dan responsivitas menunjukkan capaian yang cukup baik, aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan masih menghadapi berbagai hambatan. Ketika dibandingkan dengan lima penelitian terdahulu yang menjadi referensi utama dalam studi ini, terlihat adanya kesamaan dalam beberapa temuan, namun juga terdapat perbedaan signifikan yang menandai kebaruan penelitian ini.

Penelitian oleh Fhandemi Ulvansyah, Sri Indarti, dan Titi Darmi (2023) yang mengevaluasi Program KOTAKU di Sawah Lebar Baru, Kota Bengkulu, menemukan bahwa pelaksanaan program cukup baik dari sisi infrastruktur, namun belum maksimal secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Kelurahan Ujuna, di mana capaian pembangunan fisik seperti drainase dan jalan lingkungan berjalan sesuai rencana, tetapi tidak cukup untuk menurunkan tingkat kekumuhan. Perbedaan utamanya adalah pada pendekatan evaluasi; penelitian terdahulu tidak menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan yang komprehensif seperti yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak membahas secara terstruktur enam kriteria kebijakan.

Selanjutnya, Arjihien (2023) dalam penelitiannya di Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal, lebih menekankan pada aspek implementasi program dan kendala sosial seperti penolakan pelebaran jalan oleh masyarakat. Meskipun ada kemiripan dalam hambatan partisipasi warga, penelitian ini lebih menyoroiti proses perencanaan dan respons masyarakat secara mendalam

menggunakan pendekatan evaluatif yang terstruktur. Penelitian ini melengkapi temuan Arjihien (2023) dengan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan hanya terjadi dalam proses implementasi, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pemeliharaan hasil pembangunan.

Penelitian oleh Melly Hayati, Dahlan Tampubolon, dan Ufira Isbah (2023) di Kelurahan Sri Meranti, Pekanbaru, menggunakan metode kuantitatif dan menekankan dampak ekonomi program KOTAKU terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan itu, penelitian ini menekankan evaluasi pelaksanaan program dari berbagai dimensi, termasuk hambatan teknis dan struktural. Meskipun Hayati et al. menemukan peningkatan kualitas hidup secara statistik, penelitian ini justru menunjukkan stagnasi dalam pengurangan kawasan kumuh meskipun ada intervensi fisik, yang memperlihatkan pentingnya evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya dampak ekonomi.

Penelitian oleh Yeyen Fransiska, Veronica Tokii, Rezki Awalia, dan Ardiansyah Winarta (2023) yang juga berlokasi di Kelurahan Ujuna menyajikan konsep penataan permukiman berbasis *eco-settlements*, namun tidak secara langsung mengevaluasi pelaksanaan Program KOTAKU yang sedang berlangsung. Penelitian ini melengkapi kekosongan tersebut dengan menunjukkan bagaimana implementasi program yang nyata di lapangan belum menjawab kompleksitas permasalahan kekumuhan di Ujuna. Dengan kata lain, jika penelitian Fransiska dkk bersifat konseptual, penelitian ini bersifat aplikatif dan evaluatif terhadap kebijakan yang benar-benar sedang dilaksanakan di lokasi yang sama.

Sementara itu, Kandusu, Miswan & Yani (2018) hanya memetakan kondisi sanitasi lingkungan di Kelurahan Ujuna tanpa mengaitkannya dengan pelaksanaan program intervensi kebijakan seperti KOTAKU. Penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan mengevaluasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk pembangunan sanitasi, serta mengaitkan kondisi tersebut dengan kriteria efektivitas dan kecukupan program. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga mengevaluasi dampaknya berdasarkan struktur kebijakan yang berjalan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki posisi yang khas dan menawarkan kontribusi ilmiah baru karena menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan secara menyeluruh berdasarkan teori Dunn (2003), serta dilaksanakan di wilayah pascabencana yang kompleks. Jika penelitian-penelitian terdahulu cenderung terfokus pada satu aspek seperti dampak fisik, ekonomi, atau konsep penataan, maka penelitian ini menyajikan evaluasi lintas dimensi terhadap pelaksanaan kebijakan nyata dan mengaitkannya dengan konteks lokal dan sosial yang spesifik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Ujuna. Faktor pendukung utama adalah keberadaan kelembagaan lokal seperti BKM, KSM, dan KPP yang berperan aktif dalam pelaksanaan dan pemeliharaan program. Komitmen Pemerintah Kota Palu, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga kesinambungan program, termasuk upaya integrasi pendanaan dan kolaborasi lintas sektor.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup dominan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan merawat infrastruktur menyebabkan kerusakan dini pada hasil pembangunan. Selain itu, minimnya sosialisasi dan komunikasi dua arah membuat sebagian warga tidak mengetahui cara menyampaikan keluhan atau berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi.

Kendala lain mencakup lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kondisi geografis Kelurahan Ujuna yang berada di bantaran sungai, sehingga memiliki risiko tinggi terhadap banjir dan keterbatasan lahan. Namun demikian, muncul juga inisiatif positif dari warga seperti gotong royong dan penghijauan mandiri yang menunjukkan adanya potensi lokal yang dapat diperkuat. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program KOTAKU tidak hanya bergantung pada dana dan infrastruktur, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan lokal, serta sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, belum berjalan secara optimal dalam menurunkan tingkat kekumuhan wilayah. Evaluasi menggunakan enam kriteria dari teori Dunn (2003) menunjukkan bahwa efektivitas program masih rendah karena tidak terjadi penurunan luas kawasan kumuh sejak tahun 2021 hingga 2023. Efisiensi program juga terbatas akibat alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan. Kecukupan infrastruktur dinilai cukup baik secara teknis, namun belum menyeluruh secara fungsional. Pemerataan manfaat program belum sepenuhnya tercapai karena partisipasi dan distribusi hasil program belum menyentuh semua kelompok masyarakat secara adil. Responsivitas pemerintah terhadap aspirasi warga mulai terbentuk namun belum maksimal, sedangkan ketepatan program dinilai belum menyentuh akar permasalahan kekumuhan secara menyeluruh, khususnya aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Program KOTAKU menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan cakupan indikator kumuh yang ditangani, dominasi pendekatan fisik tanpa pemberdayaan sosial, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi warga dalam pemeliharaan infrastruktur, serta lemahnya sistem pengaduan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Di sisi lain, beberapa faktor pendukung juga ditemukan, seperti keberadaan kelembagaan lokal (BKM, KSM, KPP), komitmen pemerintah daerah, serta inisiatif masyarakat dalam bentuk gotong royong dan swadaya lingkungan. Upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dilakukan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, pelatihan kelembagaan lokal, serta pengintegrasian program dengan pendanaan dan perencanaan lainnya di tingkat kota.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan data primer yang masih terbatas pada wilayah Kelurahan Ujuna saja, sehingga generalisasi terhadap wilayah lain dengan karakteristik berbeda belum dapat dilakukan. Selain itu, karena penelitian ini berfokus pada aspek pelaksanaan kebijakan, maka dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan

masyarakat belum menjadi fokus utama. Beberapa data sekunder juga mengalami keterbatasan ketersediaan dan pembaruan, terutama data teknis mengenai indikator kekumuhan dari instansi terkait.

Arah Masa Depan Penelitian: Sebagai arah penelitian masa depan, disarankan agar dilakukan studi lanjutan yang mengkaji efektivitas program sejenis di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang berbeda untuk keperluan komparatif. Penelitian ke depan juga dapat memperluas fokus ke aspek dampak sosial ekonomi masyarakat pascaprogram, termasuk evaluasi pemberdayaan masyarakat, ketahanan komunitas, dan efektivitas intervensi non-fisik. Selain itu, pendekatan partisipatif dan studi kolaboratif lintas sektor dapat menjadi strategi evaluatif baru untuk menilai keberlanjutan kebijakan penanganan kawasan kumuh secara lebih holistik dan integratif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh informan, baik dari pihak aparatur dinas, pengelola DPKP, maupun pengurus dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, wawasan, dan data yang relevan dalam penyusunan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta kualitas hidup masyarakat Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arisani, R. E., Ali, A., & Fattah, V. Y. (2017). Revitalisasi kawasan permukiman pada aktifitas perekonomian masyarakat di bantaran sungai Palu. *E Jurnal Katalogis*, 5(10), 130–139. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1322838&val=735&title=REVITALISASI%20KAWASAN%20PERMUKIMAN%20PADA%20AKTIFITAS%20PEREKONOMIAN%20MASYARAKAT%20DI%20BANTARAN%20SUNGAI%20PALU>
- Arjihen, F. (2023). *Implementasi Program Penataan Permukiman Kumuh Di Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal*. (Tugas Akhir, Universitas Islam Sultan Agung Semarang) http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32751%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32751/2/31201900023_fullpdf.pdf
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Firori, F. A., & Wisana, I. D. G. K. (2023). THE EFFECT OF PARTICIPATION IN JKN ON UNMET NEEDS FOR HEALTHCARE SERVICES. *Indonesian Journal of Health Administration*, 11(2), 186-195. <https://doi.org/10.20473/jaki.v11i2.2023.186-195>
- Fransiska, Y., Tokii, V, Awalia, R., & Winarta, A. (2023). Konsep Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Eco-Settlements di Kelurahan Ujuna Kota Palu. *Jurnal PeWeKa*, 2, 93–102. Doi: <https://pewekatadulako.fatek.untad.ac.id/index.php/JPWKT/article/view/9>
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik Deliberatif*.

- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Hartono, D., Irawan, T., Khoirunurrofik, K., Partama, R., Mujahid, N. W., & Setiadestriati, D. (2021). Determinant factors of urban housing preferences among low-income people in Greater Jakarta. *International Journal of Housing Markets and Analysis*, 15(5), 1072-1087. <https://doi.org/10.1108/IJHMA-05-2021-0056>
- Hayati, M., Tampubolon, D., & Isbah, U. (2023). Dampak Program Kotaku Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilihat Dari Aspek Ekonomi (Studi Kasus Pada Pelaksanaan Program Kotaku Di Kelurahan Sri Meranti, Kota Pekanbaru). *Economic and Business Management International Journal*. 5(2), 117-124. <https://www.mandycmm.org/index.php/eabmij/article/view/270>
- Kandusu, F., Miswan, dan Yani, A. (2018). Gambaran Kondisi Sanitasi Lingkungan Pada Kawasan Kumuh Di Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.871>
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik :Formulasi implementasi, dan evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Sadana, A. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Graha Ilmu
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Situmorang, C. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Doi: http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In *Alvabeta*. CV. Doi: https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono
- Suprpto, F. A., Annisa, I., Falensky, M. A., Alifiani, R., Rustanto, A., & Putri, D. W. (2021). Evaluation of urban settlement sustainability in an inland municipality in Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 771(1), Article 012018. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/771/1/012018>
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2020). *Penanganan permukiman kumuh*. Pusaka Almaida
- Ulvansyah, F., Indarti, S., & Darmi, T. (2023). Evaluasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Sawah Lebar Baru Kota Bengkulu. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(1), 62-70. <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i1.7842>
- Zuhdi, S., Rusli, B., & Buchari, A. (2024). *Jejaring Kebijakan Pengelolaan Permukiman Kumuh*. Widina Media Utama

